



Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono

The Role of the Tourism Sector in Pelalawan Regency Tourism and Sport Department in the Development of the Bono Tourism Area

Hendry Andry*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia

Irwan Gesmi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia

ABSTRACT

This research aimed to determine the role of Tourism and Sports Department of Pelalawan Regency (specially tourism sector) in developing Bono as tourist attraction. This descriptive analytical research used both primary and secondary data sources with observation as data collection technique. The result showed the role of Tourism and Sports Department of Pelalawan Regency (specially tourism sector) in developing Bono has been implemented optimally. Out of four indicators (Regulator, Dynamist, Facilitators and Catalysts), Regulator as the only indicator has been fully implemented. Meanwhile on Facilitator, it has been implemented, however there has many obstacles, such as lack of facilities and infrastructure. Thus, this indicator is only carried out under certain conditions. Furthermore, Kampung Bono and Pantai Ogis are given less attention and underused in creating the well-being of the local community, local and foreign tourists.

ARTICLE HISTORY

Received 26/01/2024
Revised 08/03/2024
Accepted 29/03/2024
Published 01/04/2024

KEYWORDS

Bono; tourism; attraction; tourism development.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ hendryandry@soc.uir.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v8i1.8791>

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sebuah fenomena sosial, ekonomi dan budaya yang selalu berkaitan dengan pergerakan masyarakat ke suatu tempat maupun suatu negara di luar lingkungan tempat tinggal mereka. Industri pariwisata akan selalu dihadapkan dengan masalah sosial masyarakat tempatan dan perkembangan teknologi (Rasyidah, [2019](#)). Sektor pariwisata merupakan salah satu mobilitas untuk dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, sehingga program pengembangan sektor pariwisata diharapkan bisa diimplementasikan secara berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata kerakyatan (Nalayani, [2016](#)). Potensi pariwisata di Indonesia sangatlah besar, hal tersebut dapat timbul karena masing-masing wilayah Indonesia (dari Sabang hingga Merauke), memiliki keunikannya tersendiri, sehingga sektor pariwisata Indonesia dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi negara Indonesia itu sendiri (Aponno, [2020](#)).

Banyak destinasi wisata Indonesia yang telah terkenal di kancah Internasional, sehingga tidak salah terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pariwisata adalah salah satu sektor penyumbang penghasilan devisa negara yang penting setelah minyak dan tekstil (Pradana & Mahendra, [2021](#)). Hal ini telah dipaparkan oleh PBB, Bank Dunia dan *World Tourism*, pariwisata merupakan suatu sektor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia terutama terkait berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan ekonomi (Paramita & Putra, [2020](#)). Desa wisata merupakan suatu wilayah yang memiliki kearifan lokal yang dapat berupa budaya maupun potensi alam. Biasanya kearifan lokal tersebut dikelola oleh masyarakat tempatan sebagai daya tarik untuk para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk kepentingan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat tempatan itu sendiri (Hermawan, [2016](#)). Upaya mewujudkan desa wisata yang dapat meningkatkan kualitas alam dan lingkungan pada desa terkait sejalan dengan adanya pemerataan pembangunan serta peningkatan ekonomi masyarakat tempatan diperlukan sebuah program pengembangan desa wisata dan kebijakan pengelolaan kepariwisataan (Ananda & Dirgahayu, [2021](#)).

Pada era *Tourism 4.0*, penyebaran informasi terkait aktivitas wisata oleh generasi milenial di media sosial, menjadi salah satu hal penting yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sebuah objek destinasi wisata daerah menjadi destinasi wisata kekinian (Hakim, [2018](#)). Dalam mengembangkan pariwisata Indonesia, terdapat badan pemerintah pusat yang berperan penting yaitu Kementerian Pariwisata. Selain badan pemerintah pusat, badan pemerintah di tingkat daerah juga berperan penting dalam mengembangkan pariwisata di tingkat daerah. Badan pemerintah di tingkat daerah yang berperan penting dalam mengembangkan pariwisata adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (selanjutnya disebut Disparpora) yang berwenang mengembangkan pariwisata di wilayah hukum masing-masing setiap daerah, baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat kota. Adapun yang dimaksud Disparpora dalam penelitian ini adalah Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan.

Salah satu peran umum dari Disparpora Kabupaten Pelalawan yang telah diatur pada Peraturan Bupati Pelalawan No.60 Tahun 2021 adalah mengelola, membangun hingga melakukan pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Pelalawan. Lebih lanjut, untuk mewujudkan peran tersebut pihak Disparpora (khususnya bidang pariwisata) membentuk program kerja yang sejalan dengan salah satu misi Kabupaten Pelalawan (salah satu misi yang dimaksud ialah mengembangkan kawasan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya Melayu sebagai perekat negeri (Maju Wisata dan Budaya). Adapun program kerja yang dibentuk pihak Disparpora adalah melakukan peningkatan daya tarik destinasi wisata; melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten dan melakukan pemasaran wisata.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibukota Kabupaten Pelalawan berada di kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten Pelalawan merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Kampar (Asmara & Muslim, [2015](#)). Adapun luas wilayahnya ialah sekitar 18.812,947 km². Luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu seluas 11.605,97 km² (wilayah daratan) dan seluas 7.207 km² (wilayah perairan). Melihat lokasi geografis tersebut, dapat diidentifikasi Kabupaten Pelalawan berada tepat di pantai Timur pulau Sumatera dan juga portal untuk mengakses wilayah selatan Provinsi Riau. Posisi strategis ini merupakan modal dasar keunggulan pembangunan dan pengembangan pariwisata dengan potensi alam serta budaya yang unik dan diikuti adanya lokasi pariwisata maupun objek wisata yang tidak kalah bagusnya dibandingkan dengan objek wisata daerah lain sehingga dapat menjadi tempat yang memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjungnya. Dengan kata lain, apabila dilihat dari sektor pariwisata, Kabupaten Pelalawan memiliki potensi berbagai objek wisata, yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata peninggalan sejarah.

Selanjutnya, berkaitan dengan wisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Pelalawan, terdapat salah satu Kawasan Objek Wisata Bono. Kawasan Objek Wisata Bono sendiri merupakan sebuah objek wisata yang terdiri dari sebuah Pantai (Pantai Ogis) dan Gelombang Bono itu sendiri (Kartika et al., [2016](#)). Pantai Ogis adalah pantai berpasir putih yang cukup luas yang bisa difungsikan sebagai tempat balapan sepeda motor dan tempat bermain layangan saat menunggu gelombang Bono menghempas ke bibir pantai. Sedangkan Bono adalah gelombang sungai yang timbul pada Muara Sungai Kampar (di wilayah Kabupaten Pelalawan) dan bertemu dengan Muara Sungai Rokan (di wilayah Kabupaten Rokan Hilir).

Ketika penulis melakukan wawancara dengan ibu Puji Triastuti (Staf Bagian Pariwisata Disparpora Kabupaten Pelalawan), ternyata program kerja (terkhusus pengelolaan kawasan strategis pariwisata, dengan mengembangkan kawasan wisata terkait) telah diimplementasikan sedemikian rupa sejak Tahun 2015, namun kurang maksimal. Hal tersebut dibuktikan hasil observasi penulis ke Kawasan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan. Ketika melakukan observasi ke Kawasan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan, penulis menemukan banyak bentuk fisik sarana prasarana (yang

tidak terawat, runtuh dan ditumbuhi tanaman liar). Apabila penulis identifikasi dari hasil wawancara dan observasi tersebut maka diketahui sejak Tahun 2015 hingga 2019 di Kawasan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan telah terdapat dua buah menara pandang (yang pada saat penulis melakukan observasi, keadaan masing-masing menara pandang tersebut runtuh dan ditumbuhi semak belukar), satu buah pentas seni (yang tidak dirawat dengan baik atau terabaikan keberadaannya), dua buah pembangunan gazebo yang belum rampung hingga saat penelitian ini disusun (Tahun 2023), sedikitnya ketersediaan toilet yang layak, runtuhnya toilet maupun tempat pemandian umum.

Sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2023, akses darat ke Pantai Ogis (yang juga termasuk Kawasan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan) sepanjang 1,5 km ditumbuhi tanaman liar. Dengan kata lain, akses darat yang harusnya difungsikan untuk menuju ke Kawasan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan tidak difasilitasi secara baik. Menurut Penulis akses yang sulit tersebut membuat para wisatawan yang ingin mengunjungi Kawasan Objek Wisata Bono menjadi malas untuk berlibur ke Kawasan Objek Wisata Bono. Hal ini seharusnya menjadi masalah penting untuk diselesaikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan mengumpulkan penghasilan daerah yang berasal dari sektor pariwisata.

Kemudian, oleh karena Gelombang Bono untuk kegiatan *surfing* di Kawasan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan hanya terjadi sekitar bulan November dan Desember (karena merupakan fenomena alam), ketika penulis melakukan observasi pada bulan September dan Oktober 2023, Kawasan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan tidak memberikan “suasana wisata” yang memang dibutuhkan oleh para wisatawan. Hal ini dibuktikan tidaknya adanya kegiatan “unik”, seperti tidak ada toko-toko cenderamata khas daerah tempatan, tidak ada acara pentas seni budaya masyarakat tempatan, tidak adanya kegiatan *tour guide* keliling di Kawasan Objek Wisata Bono dan lain sebagainya, sehingga memunculkan rasa kecewa para wisatawan (khususnya wisatawan mancanegara) ketika berwisata ke Kawasan Objek Wisata Bono pada waktu-waktu tertentu (ketika Gelombang Bono belum muncul).

Kemudian untuk dapat menemukan *novelty* (kebaruan) informasi dalam tulisan ini maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian penulis saat ini, namun juga memiliki perbedaan tertentu yaitu sebagai berikut:

Penelitian Riska Destiana dan Retno Sunu Astuti tentang “*Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*” berfokus pada perwujudan pariwisata yang mengedepankan kebutuhan dasar umat Islam di destinasi wisata sesuai ketentuan syariah Islam (Destiana & Astuti, [2019](#)). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa telah terdapat beberapa daerah di Indonesia, yang menyelenggarakan wisata halal. Sementara itu, pengembangan penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia terdapat beberapa hambatan yaitu belum terbentuknya regulasi yang mengatur pengembangan pariwisata halal, masih adanya produk usaha wisata yang belum disertifikasi halal serta kurangnya advokasi mengenai urgensi sertifikasi halal dan pariwisata halal kepada masyarakat. Dan salah satu hal penting dalam upaya pengembangan pariwisata halal di Indonesia ialah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia kawasan objek wisata terkait.

Penelitian Shafira Fatma Chaerunissa dan Tri Yuniningsih berjudul “*Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonopolo Kota Semarang*” berfokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Wonopolo (Chaerunnisa & Yuniningsih, [2020](#)). Adapun Desa Wisata Wonopolo merupakan sebuah desa yang berada di Kelurahan Wonopolo Kota Semarang. Desa tersebut telah ditetapkan sebagai Desa Wisata dengan Surat Keputusan Walikota Semarang yang bernomor 556/407 Tahun 2012. Penulis penelitian tersebut menggunakan enam komponen pengembangan pariwisata yaitu *Attraction, Accessibility, Amenities, Accommodation, Activity* dan

Ancillary Service untuk mengetahui pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Wonopolo dan seperti apa hambatanya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonopolo belum optimal, masih ada yang perlu di perbaiki dari masing-masing komponen tersebut.

Penelitian Ertien Rining Nawangsari dan Leily Suci Rahmatin yang berjudul “*Opportunities and Challenges for Community-Based Tourism in Tamansari Village in the New Normal Era*” membahas peluang dan tantangan pariwisata berbasis masyarakat, untuk dapat beradaptasi pada kehidupan baru ketika dan setelah pandemi Covid-19 melanda dunia, khususnya pada Desa Wisata Tamansari (Nawangsari & Rahmatin, [2021](#)). Hasil penelitian tersebut adalah peluang partisipasi masyarakat atas pariwisata di Desa Wisata Tamansari dapat berupa tersedianya keanekaragaman atraksi wisata dalam satu kawasan pariwisata. Adapun tantangan utama dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini lebih berfokus kepada tingkat kepedulian masyarakat terkait akan konsistensi masyarakat tempatan maupun wisatawan dalam menjaga protokol kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata di era *New Normal* (pasca pandemi Covid-19) diharapkan dapat mengadaptasi konsep CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability*). Konsep tersebut diharapkan mampu untuk memberikan kepercayaan wisatawan terhadap daya tarik wisata pada Desa Wisata Tamansari dalam upaya mengurangi dampak penularan wabah Covid-19. Namun, pengimplementasian konsep tersebut masih sangat sulit terwujud apabila pengusaha UMKM yang berada pada kawasan wisata Desa Wisata Tamansari tersebut, tidak memiliki kemampuan dan keinginan untuk menyediakan fasilitas protokol kesehatan yang diperlukan.

Elsa Syabilla Gianary, Asep Kadarisman dan Sri Soedewi menulis “*Perancangan Buku Ilustrasi sebagai Media untuk Memperkenalkan Batik Bono*” dan mendeskripsikan perancangan buku referensi dengan ilustrasi sebagai media untuk memperkenalkan Batik Bono guna memberi wawasan dan meningkatkan apresiasi masyarakat, sehingga hasil akhir penelitian tersebut ialah mempublikasikan sebuah buku referensi sebagai acuan untuk memperkenalkan Batik Bono (Gianary et al., [2023](#)).

Penelitian Sri Nurhayati Qodriyatun yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa*” berfokus pada implementasi kebijakan terkait pengembangan pariwisata apakah sudah berkelanjutan atau belum (Qodriyatun, [2018](#)). Penelitian tersebut dilakukan di Karimunjawa dan ditinjau dari perspektif pembentuk kebijakan, pelaksana kebijakan dan target masyarakat tempatan. Hasil penelitiannya adalah pengembangan pariwisata yang diimplementasikan belum berbentuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Memang dapat diidentifikasi pada aspek ekonomi pengembangan pariwisata di wilayah Karimunjawa telah memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat tempatan, namun dalam berbagai aspek lainnya (seperti aspek sosial dan ekologis telah terjadi perubahan nilai serta kerusakan lingkungan), sehingga perwujudan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, penulis penelitian tersebut menyarankan perlu adanya suatu perencanaan yang terintegrasi antara *stakeholders* dan berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Karimunjawa.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena hal paling unik dan berharga di Kawasan Objek Wisata Bono ialah adanya ombak maupun Gelombang Bono itu sendiri. Adapun Ombak maupun Gelombang Bono juga merupakan fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu tertentu saja, sehingga ketika ombak maupun Gelombang Bono tersebut tidak muncul (sedangkan para wisatawan tetap ingin berwisata ke Kawasan Objek Wisata Bono tersebut), maka secara alami Kawasan Objek Wisata Bono mengalami masa “hiatus” alias “tidak terlalu menarik” untuk tempat berwisata apabila tidak dikelola, tidak dikembangkan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sedemikian rupa. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam upaya mengembangkan Kawasan Objek Wisata

Bono hingga menjadi destinasi wisata unggul dan ramah dengan masyarakat tempatan maupun wisatawan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau maupun ditingkat nasional dan internasional.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis (Mukhtar, [2013](#)). Penelitian ini memfokuskan kepada pengumpulan serta pengidentifikasian data di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui peranan bidang pariwisata di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Pelalawan dalam pengembangan Objek Wisata Bono. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif (digunakan untuk memahami makna yang dialami oleh sejumlah individu dikarenakan timbulnya masalah sosial) (Creswell & Creswell, [2018](#)). Adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer (merupakan data yang berasal dari informan penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan beserta Staf) dan data sekunder (pengidentifikasian dokumen, berbagai arsip kebijakan, hingga laporan kegiatan yang diolah dan disajikan untuk menyusun rencana teknis penelitian, pengungkapan objek dan lokus penelitian serta berbagai hal yang terkait dengan penggalan analisis objek penelitian).

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi (penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi objek penelitian dalam upaya memperoleh data berdasarkan perilaku serta aktivitas masyarakat yang berada di sekitar dan/atau tepat di lokasi penelitian. Adapun secara spesifik jenis observasi yang penulis lakukan ialah observasi pasif yaitu dilakukan hanya untuk terlibat secara langsung terhadap proses pengamatan tanpa harus menekan partisipan atau informan); wawancara (penulis melakukan *face to face* interview dengan partisipan atau informan secara *daring* maupun *luring*); pengumpulan dokumen (baik dalam bentuk *hardcopy*, seperti, koran, buku harian, makalah, laporan kantor terkait serta surat, maupun dalam bentuk *softcopy* seperti email dan *file-file* dokumen yang masih ada di dalam suatu perangkat elektronik); dan melalui bahan audio visual (berupa foto maupun video film terkait objek penelitian).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kawasan Objek Wisata Bono

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya Kawasan Objek Wisata Bono merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di wilayah Kabupaten Pelalawan. Secara geografis, wilayah Timur Kabupaten Pelalawan bertepatan dengan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Karimun serta wilayah Baratnya bersebelahan dengan wilayah Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara itu, wilayah Utaranya bertepatan dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak. Lebih lanjut, bagian Selatan Kabupaten Pelalawan bersebelahan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian apabila dilihat struktur wilayah, Kabupaten Pelalawan terdiri dari dataran rendah (yang luasnya mencapai 93% dari total luas wilayah keseluruhan). Apabila dilihat secara fisik sebagian besar wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daerah konservasi yang pada bagian tertentu memiliki karakteristik tanah bersifat asam dan merupakan tanah organik, memiliki kelembaban dan temperatur udara yang agak tinggi, sehingga air tanahnya merupakan air payau. Kabupaten Pelalawan memiliki sumber daya alam yang potensial dan sudah seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan. Salah satu destinasi wisata alam yang terdapat di Kabupaten Pelalawan yaitu Kawasan Objek Wisata Bono.

Kawasan Objek Wisata Bono merupakan sebuah wilayah destinasi yang terdiri dari sebuah Pantai (Pantai Ogis) dan Gelombang Bono itu sendiri (Yazid et al., [2022](#)). Pantai Ogis adalah pantai

berpasir putih yang cukup luas (Nurjana et al., 2017) dan bisa difungsikan sebagai tempat balapan sepeda motor serta tempat bermain layangan saat menunggu Gelombang Bono menghempas ke bibir pantai. Sedangkan Bono adalah gelombang sungai yang berada di Kecamatan Teluk Meranti, tepatnya di Kuala Sungai Kampar di Kabupaten Pelalawan dan di Kuala Sungai Rokan di Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam kajian lingkungan mekanika fluida (*Environmental Fluid Mechanics*), Bono disebut Tidal atau *bore/eagir/eager/eygre* (Yuliarti & Saputra, 2015). Secara ilmiah, Gelombang Bono (*Bono Wave*) merupakan pertemuan arus pasang air laut dengan arus sungai dari Hulu menuju muara (Hilir) (Yani et al., 2021). Air laut mengalir masuk dan bertemu dengan air Sungai Kampar sehingga terjadi gelombang dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga menghasilkan suara seperti suara guntur dan suara angin kencang. Pada musim pasang tinggi (biasanya terjadi ketika musim hujan, yaitu sekitar bulan November dan Desember) debit air Sungai Kampar cukup besar. Ketika musim tersebut datang maka Gelombang Sungai Kampar (yang membentang dari tepi sungai yang satu ke tepi sungai yang lain) bisa mencapai 4-6 meter. Gelombang tersebut dapat menutupi keseluruhan badan sungai. Hal ini merupakan salah satu peristiwa alam yang cukup langka dan jarang terjadi. Para wisatawan akan menyaksikan sebuah keajaiban alam yang menakjubkan berupa gelombang besar (yang layaknya ada di tengah laut), namun di Kawasan Objek Wisata Bono, gelombang tersebut dapat dinikmati di sebuah sungai air tawar dan bisa dimanfaatkan untuk *surfing* oleh para peselancar lokal maupun mancanegara.

Saat ini Kawasan Objek Wisata Bono merupakan salah satu ikon atau objek wisata andalan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau bahkan nasional, tapi sampai saat ini belum ada peningkatan yang maksimal dari aspek pembangunan dan pengembangan yang bisa membuat wisatawan tertarik dan merasakan kenyamanan dalam proses perjalanan pariwisatanya untuk menikmati Kawasan Objek Wisata Bono tersebut. Untuk mengetahui kondisi lebih lanjut terkait Kawasan Objek Wisata Bono, berikut beberapa dokumentasi yang penulis peroleh ketika melakukan observasi langsung ke Kawasan Objek Wisata Bono.



Gambar 1. Kondisi Pantai Ogis (Kawasan Objek Wisata Bono) sebelum kedatangan Ombak/Gelombang Bono
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023



Gambar 2. Kondisi Pantai Ogis (di Kawasan Objek Wisata Bono), ketika Ombak Bono muncul
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023



Gambar 3. Posisi Wisatawan Cilik yang sedang menikmati suasana *Sunset* dan Ombak Bono di Kawasan Objek Wisata Bono
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023



Gambar 4. Kondisi salah satu sarana prasarana (permainan anak-anak) di Kawasan Objek Wisata Bono yang tidak terurus dengan baik
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023

Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono

Disparpora Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Kemudian Tugas Pokok Disparpora Kabupaten Pelalawan telah diatur di dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan. Pada peraturan tersebut terdapat beberapa program terkait pengembangan pariwisata Kabupaten Pelalawan di antaranya, program peningkatan daya tarik destinasi wisata, program pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten dan program pemasaran wisata.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Disparpora didukung oleh beberapa sumber daya manusia atau pegawai. Terhitung hingga bulan Mei tahun 2021 terdapat 169 orang sumber daya manusia atau pegawai yang bertugas di Disparpora Kabupaten Pelalawan. Adapun rincian dari 169 orang tersebut ialah sebagai berikut: Aparatur Sipil Negara atau ASN (33 orang, yang terdiri dari pria dan wanita dari latar belakang Pendidikan Formal yang berbeda. Latar belakang Pendidikan Formal yang terendah adalah di Tingkat SLTA dan yang tertinggi ialah Tingkat S2), Pegawai Tidak Tetap di Objek Wisata (98 orang) dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas (38 orang). Disparpora Kabupaten Pelalawan, memiliki Visi yang sama dengan Visi Kabupaten Pelalawan yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Pelalawan MAJU yang Sejahtera, Mandiri, Inovatif dan Berdaya Saing Global Secara Berkelanjutan dalam Masyarakat Inklusif yang Beradat, Beriman, Bertakwa dengan Mengembangkan Nilai Budaya Melayu Tahun 2026”.

Pernyataan Visi tersebut memuat makna sebagai berikut: Makmur (masyarakat Kabupaten Pelalawan berada dalam suatu kondisi yang berkecukupan dan tidak kekurangan dalam perekonomian); Adil (masyarakat Kabupaten Pelalawan mendapatkan perlakuan yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih hak sesuai kewajibannya terutama dalam kehidupan keagamaan, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan Pendidikan); Jaya (kondisi yang diharapkan untuk selalu berhasil, mendapatkan kesuksesan terutama berjaya dalam kinerja untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dengan dukungan basis data terintegrasi); dan Unggul (untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kondisi kualitas moral, sosial dan intelektual yang berkembang dengan baik, memiliki daya saing, kreatif, inovatif dalam pembangunan SDM yang beriman dan berilmu pengetahuan). Sementara itu, misi Disparpora ialah “mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan iman (maju SDM) dan mengembangkan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya melayu sebagai perekat negeri (maju wisata dan budaya)”.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Disparpora Kabupaten Pelalawan memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat (yang terdiri dari Kasubbag Program, Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan), dan berbagai bidang tertentu. Beberapa bidang tersebut ialah bidang pariwisata, bidang kepemudaan, bidang olahraga serta bidang sarana dan prasarana. Kemudian di setiap bidang juga dipimpin oleh kepala bidang dan dibagi menjadi beberapa sub bidang. Khusus untuk bidang pariwisata, sub bidangnya terbagi menjadi 3 jenis yaitu Subbid. Pengembangan Objek Wisata, Subbid. Ekonomi Kreatif dan Subbid. Pemasaran Wisata.

Kemudian apabila diidentifikasi secara umum maka bidang pariwisata mempunyai beberapa tugas yaitu mengimplementasikan seluruh program kegiatan yang dapat mengembangkan, mempromosikan hingga memberikan pelatihan serta membina pihak-pihak di dalam suatu industri

maupun destinasi pariwisata terkait. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan informasi mengenai sinkronisasi peran berbagai pihak dan dengan melakukan evaluasi keseluruhan pengimplementasian program yang telah direncanakan. Sementara itu, terdapat beberapa fungsi Bidang Pariwisata yaitu wajib: menentukan kebijakan terkait rencana teknis pengembangan, pemasaran, pengendalian serta evaluasi program pada industri maupun destinasi pariwisata; mempromosikan pariwisata berikut juga fasilitas kepariwisataan pada destinasi wisata; mengklasifikasikan tugas antara pimpinan dan pegawainya, sehingga seluruh pihak dapat saling mengayomi secara moril maupun secara teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing; serta bertanggung jawab atas tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Secara spesifik tugas Sub. Bidang Pemasaran Pariwisata ialah harus membentuk berbagai rencana strategis terkait program yang akan dilakukan oleh Sub. Bidang pengembangan objek wisata dan disesuaikan dengan jumlah anggaran per tahun. Rencana strategis tersebut digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, Sub. Bidang Pemasaran Pariwisata juga harus merumuskan rencana strategis guna mengembangkan pemasaran destinasi wisata pada wilayah kerjanya. Kemudian, Sub. Bidang Pemasaran Pariwisata bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pengklasifikasian tugas maupun fungsi antara pimpinan dan pegawai di wilayah kerjanya. Tidak sampai di situ, Sub. Bidang Pemasaran Pariwisata bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi apakah keseluruhan program yang telah diatur pada rencana strategis telah dapat mengembangkan destinasi pariwisata terkait.

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, secara rutin maupun berkala Sub. Bidang Pemasaran Pariwisata diwajibkan untuk mengidentifikasi dan memahami seluruh kebijakan teknis maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan dari Sub. Bidang Pemasaran Pariwisata itu sendiri. Adapun *output* dari tugas pokok dan fungsinya tersebut ialah untuk meningkatkan promosi destinasi kepariwisataan (seperti membentuk serta menyiarkan materi kepariwisataan yang ada di wilayah kerjanya; mengelola pusat layanan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara; menyiarkan seluruh informasi dan menganalisis hingga mengevaluasi pengembangan pasar pariwisata; melaporkan pengimplementasian program rencana strategis yang telah disusun; membuat kesepakatan kerja dengan investor lokal maupun mancanegara; mengidentifikasi data dan informasi terkait pengelolaan pasar wisata baik di pasar lokal maupun mancanegara) yang dibenarkan oleh hukum.

Secara umum peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata terbagi menjadi 4 yaitu (Bagaihing et al., [2023](#)): regulator (pemerintah harus membentuk, menerbitkan dan memberlakukan sebuah regulasi sebagai acuan ataupun pedoman dalam untuk mewujudkan keseimbangan penyelenggaraan pembangunan); dinamisator (dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah harus menghimbau multipihak ketika terjadi berbagai hambatan tertentu. Pengimbuhan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memberikan konseling, bimbingan maupun pendampingan kepada sumber daya manusia terkait dalam upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan); fasilitator (pemerintah berperan sebagai narahubung multipihak dalam mengoptimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan situasi yang kondusif, seperti, menciptakan tertib, nyaman, aman serta memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan dengan memberikan pendanaan yang diperlukan); dan katalisator (sebagai pihak yang berperan untuk mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara dengan membangun partisipasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang menikmati penyelenggaraan pembangunan).

Sementara aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut: Atraksi Wisata (daya tarik yang berasal dari beberapa hal pertama, keadaan alam, seperti keindahan panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau, dan lain sebagainya

(Kadarisman, [2021](#)). Kedua, objek buatan manusia, seperti museum dan masjid kuno. Ketiga, unsur-unsur budaya, seperti, kesenian, adat istiadat, kuliner dan lain sebagainya); Transportasi (segala sesuatu yang dapat mempengaruhi “derasnya arus” wisatawan ke objek wisata); Akomodasi (berbagai hal yang berhubungan dengan sarana penyediaan jasa pelayanan di objek wisata terkait, seperti adanya penginapan, tempat ibadah, kantin dan lain sebagainya); Fasilitas Pelayanan (tersedianya pelayanan yang bervariasi sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pembangunan objek wisata); Infrastruktur (fasilitas untuk mendukung jasa pelayanan. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar). Kemudian, oleh karena fokus penelitian ini ialah peranan bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono, maka untuk memaparkan hal tersebut penulis menggunakan 4 indikator yaitu peran bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai regulator, peran bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai dinamisator, peran bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai fasilitator dan peran bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai katalisator.

Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu pemerintah berperan sebagai pihak yang mewujudkan efektivitas tertib administrasi pembangunan dengan membentuk arah tertentu demi menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dan mengeluarkan regulasi-regulasi yang harus diimplementasikan sedemikian rupa (Firdaus, [2020](#)). Oleh karena itu, untuk mengetahui peranan bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai regulator dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Objek Wisata Bono dapat diidentifikasi dari dibentuknya, diterbitkannya dan diberlakukannya sebuah ataupun beberapa regulasi sebagai acuan ataupun pedoman dalam untuk mewujudkan keseimbangan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan.

Secara umum, peran pemerintah sebagai regulator pengembangan kepariwisataan telah dilakukan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan disusun dan diberlakukannya UU Kepariwisata. Pada UU Kepariwisata tersebut telah diatur terkait Pembangunan Kepariwisata. Pembangunan Kepariwisata harus dilakukan berdasarkan beberapa asas yaitu (asas manfaat; asas kekeluargaan; asas adil dan merata; asas keseimbangan; asas kemandirian, asas kelestarian; asas partisipatif; asas berkelanjutan; asas demokratis; kesetaraan dan asas kesatuan). Lebih lanjut, selain mengikuti beberapa asas tersebut, Pembangunan Kepariwisata harus diwujudkan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya, keunikan dan kekhasan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Kedua hal tersebut telah diatur di Pasal 2 dan Pasal 6 UU Kepariwisata.

Selain aturan yang bersifat nasional tersebut, ternyata telah terdapat beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Pelalawan yang mengatur tentang kepariwisataan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Selain itu, juga terdapat Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan yang pada intinya mengatur terkait Tugas Pokok Disparpora Kabupaten Pelalawan. Dengan kata lain, peranan bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai regulator dalam membentuk, menerbitkan dan memberlakukan sebuah regulasi sebagai acuan ataupun pedoman dalam mewujudkan keseimbangan penyelenggaraan Pembangunan atau pengembangan kepariwisataan (terkhusus untuk Kawasan Objek Wisata Bono) telah terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibentuk, diberlakukannya serta diimplementasikannya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan Peraturan Bupati Pelalawan

Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan oleh bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan.

Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator dapat diartikan bahwa pemerintah mempunyai peran sebagai pihak yang mengkoordinasikan partisipasi berbagai pihak (ketika mengembangkan suatu kawasan pariwisata) sebagai upaya untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah yang lancar dan efektif (Firdaus, [2020](#)). Oleh karena itu, menurut penulis, untuk mengetahui peranan bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai dinamisator dalam mengimplementasikan pembangunan di Kawasan Objek Wisata Bono dapat diidentifikasi dengan adanya kegiatan konseling, pelatihan, bimbingan maupun pendampingan kepada Sumber Daya Manusia terkait, dalam upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kawasan Objek Wisata Bono.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Puji Triastuti (Staf Bagian Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan) menyatakan kesetujuan pendapat bahwa pada prinsipnya Sumber Daya Manusia dalam organisasi harus memiliki kompetensi agar bisa patuh dan berdaya tanggap tinggi dalam menjalankan sebuah kebijakan atau program. Namun, Ibu Puji juga memberikan informasi bahwa pihak Disparpora (khususnya pada bidang pariwisata) sebenarnya telah melakukan beberapa pelatihan kepada Sumber Daya Manusia (yang ikut menyelenggarakan pembangunan di Kawasan Objek Wisata Bono ini) seperti pelatihan untuk dapat memahami Teknologi Informasi, pelatihan agar lancar berbahasa Inggris guna mewujudkan sistem penggunaan *tour guide*. Tapi ternyata pelatihan-pelatihan tersebut belum berjalan secara efektif.

Faktor terbesar yang menyebabkan ketidakefektifan ini ialah karena ternyata berdasarkan pengakuan informan (Ibu Puji Triastuti), sebagian besar hasil yang didapat dalam pengembangan Sumber Daya Manusia tidak seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan dari pihak Sumber Daya Manusia itu sendiri yang tidak konsisten menjalankan hasil pelatihan untuk pengembangan diri mereka. Pihak Sumber Daya Manusia tersebut juga kurang keseriusan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembangunan di Kawasan Objek Wisata Bono. Dengan kata lain, peran bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai dinamisator dalam upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan (terkhusus untuk Kawasan Objek Wisata Bono) telah diimplementasikan sedemikian rupa, namun tidak berjalan dengan efektif karena faktor kurangnya kualitas, keinginan serta kesadaran Sumber Daya Manusia terkait (yang ikut menyelenggarakan pembangunan Kawasan Objek Wisata Bono) ini.

Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator, dapat diberi makna bahwa pemerintah berperan sebagai pihak yang menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan bagi seluruh kepentingan para pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan kawasan objek wisata tertentu, untuk dapat mewujudkan pembangunan daerah (di ranah kepariwisataan) yang lebih optimal (Firdaus, [2020](#)). Oleh karena itu, untuk mengetahui peranan bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Objek Wisata Bono dapat diidentifikasi dengan tersedianya sarana prasarana yang optimal (termasuk kegiatan pariwisata) sehingga terciptanya suasana tertib, nyaman dan aman ketika wisatawan datang berkunjung ke Kawasan Objek Wisata Bono.

Berdasarkan hasil observasi penulis ke lokasi objek penelitian ternyata ditemukan bahwa secara garis besar ada dua bentuk kegiatan pariwisata di kawasan Objek Wisata Bono yaitu pertama program tahunan (Bekudo Bono atau Tirta Bono) yang merupakan salah satu program dari

Disparpora Kabupaten Pelalawan. Kedua, kegiatan pariwisata lokal kelurahan (pihak yang menyelenggarakan kegiatan ini ialah masyarakat tempatan atau Pokdarwis, namun, tetap dalam pengawasan kelurahan, karena anggaran yang digunakan oleh masyarakat tempatan untuk kegiatan ini berasal dari pihak kelurahan dan diperoleh dari pihak ketiga (*stakeholder*).



Gambar 5. Salah satu peserta lomba (kompetisi) Bekudo Bono di Kawasan Objek Wisata Bono

Sumber: (Muharrman, [2013](#))

Hasil observasi penulis ke lokasi objek penelitian, penulis juga dapat mengidentifikasi ketidakefektifan dan kurang maksimalnya peran bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kawasan Objek Wisata Bono, karena pihak bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan hanya dilakukan pada kondisi tertentu (ketika Gelombang Bono ada, yaitu sekitar bulan November dan Desember). Selain pada kondisi tersebut Kawasan Objek Wisata Bono (wilayah Kampung Bono dan Pantai Ogis) kurang diperhatikan. Padahal menurut penulis kegiatan pariwisata dapat diwujudkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat tempatan pada Kawasan Objek Wisata Bono tersebut.

Ketika penulis melakukan survei ke lokasi objek penelitian, sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata tidak tersedia dengan layak. Fasilitas sarana prasarana yang dimaksud ialah seperti, tempat parkir, rumah makan, penginapan, toilet, musala, serta wahana permainan anak-anak dan lain sebagainya. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aswinda Hari Haharap (Kabid Pariwisata Disparpora Kabupaten Pelalawan), ternyata dahulu (sejak Tahun 2015) sarana prasarana yang penulis paparkan tersebut telah tersedia namun tidak terpelihara dengan baik, bahkan ada yang sudah roboh.

Hasil observasi penulis selanjutnya ialah kegiatan pariwisata lokal yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat tempatan ternyata tidak memiliki jadwal pasti, sehingga jika ternyata terdapat agenda kegiatan pariwisata lokal di kawasan itu, sering kali hal tersebut merupakan “bonus” bagi wisatawan yang kebetulan datang berkunjung ke Kawasan Objek Wisata Bono pada saat agenda tersebut dilaksanakan. Sementara itu, untuk sampai ke Kawasan Wisata Bono dari ibukota Provinsi Riau (Kota Pekanbaru) membutuhkan waktu dan jarak tempuh yang lama (lebih kurang sekitar 5 jam perjalanan darat dengan kondisi lalu lintas lancar) serta biaya yang sangat mahal (karena selain menempuh perjalanan darat untuk sampai ke wahana Bono-nya, para wisatawan masih harus melanjutkan perjalanan menggunakan *speed boat*). Lebih lanjut, ketika penulis melakukan survei ke Kawasan Objek Wisata Bono masih terdapat infrastruktur jalan yang belum diaspal sejauh 12 Km.



Gambar 6. Kondisi akses darat (infrastruktur jalan) untuk menuju Kawasan Objek Wisata Bono
Sumber: (Redaktur, [2022](#))

Dengan kata lain, peranan bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai fasilitator dalam upaya penyelenggaraan pembangunan Kawasan Objek Wisata Bono telah diimplementasikan sedemikian rupa, namun belum terlaksana dengan optimal. Karena menurut penulis, seharusnya pihak bidang pariwisata Disparpora Kabupaten Pelalawan tidak hanya melakukan perannya sebagai fasilitator (dalam mengembangkan kepariwisataan Kawasan Objek Wisata Bono) ketika terjadi Gelombang Bono (untuk kegiatan *surfing*), yang memang akan muncul sekitar bulan November dan Desember saja, namun juga dapat diwujudkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat tempatan di Kawasan Objek Wisata Bono (wilayah Kampung Bono dan Pantai Ogis), seperti mengadakan acara pentas seni budaya masyarakat tempatan, kegiatan *tour guide* keliling di Kawasan Objek Wisata Bono, advokasi tentang Kawasan Objek Wisata Bono, menyediakan toko-toko atau infrastruktur sebagai penunjang untuk memperkenalkan kerajinan khas Kawasan Objek Wisata Bono dan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk membina serta memberikan “pencerahan” untuk menumbuhkan kesadaran bagi Sumber Daya Manusia agar dapat dan mau berpartisipasi dalam mengembangkan Kawasan Objek Wisata Bono, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan wilayah tempat tinggal mereka.

Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator dapat diartikan bahwa pemerintah memiliki posisi sebagai agen dalam mengembangkan suatu pembangunan negara maupun daerah. Pemerintah sebagai agen harus berupaya untuk mewujudkan percepatan pengembangan potensi negara dan daerah (Firdaus, [2020](#)). Oleh karena itu untuk, mengetahui peranan bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai katalisator dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Objek Wisata Bono dapat diidentifikasi dengan adanya kegiatan maupun perwujudan tindakan terhadap proses percepatan pengembangan potensi daerah dan negara melalui pembangunan minat partisipasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat (wisatawan) yang menikmati penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian ini (Ibu Puji Triastuti dan Bapak Aswinda Hari Haharap), penulis memperoleh informasi bahwa telah ada koordinasi dan partisipasi para pihak yang terlibat seperti koordinasi dengan Sumber Daya Manusia (masyarakat tempatan), Disparpora pada umumnya dan bidang pariwisata Disparpora pada khususnya, pihak kecamatan, pihak kelurahan dan juga kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam melaksanakan program bidang

pariwisata untuk mewujudkan pengembangan sedemikian rupa di Kawasan Objek Wisata Bono. Dengan kata lain, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diidentifikasi bahwa peranan bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai katalisator telah terpenuhi sebagaimana mestinya.

Sementara itu, berdasarkan pemaparan terpenuhi atau tidaknya peran bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan tersebut maka menurut penulis, pengimplementasian kebijakan pengelolaan kepariwisataan membutuhkan keterlibatan institusi, atau organisasi pemerintah dalam hal ini, pihak kementerian dan dinas pariwisata maupun organisasi swasta serta lembaga swadaya masyarakat lokal, lembaga adat masyarakat, komunitas adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat, karena urusan kepariwisataan yang juga merupakan urusan publik tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah. Walaupun pemerintah (dalam hal ini bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan) telah melakukan dan meningkatkan pengembangan pariwisata Kawasan Objek Wisata Bono, namun belum terlihat dampak positif terhadap peningkatan prestasi Kawasan Objek Wisata Bono dalam upaya pengembangan objek wisata alam di tanah melayu dan wisata budaya melayu, baik untuk tingkat daerah maupun nasional. Hal tersebut tentunya menjadi tugas dan peran Disparpora Kabupaten Pelalawan (dalam hal ini bidang pariwisata), karena apabila peningkatan prestasi tersebut dapat dicapai maka bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan telah menjadi salah satu anggota organisasi pemerintah yang dapat merealisasikan misi dari Kabupaten Pelalawan yaitu “mengembangkan kawasan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya melayu sebagai perekat negeri (Maju Wisata dan Budaya)”.

Selain itu, menurut penulis peranan bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan tugasnya (dalam mengelola dan melakukan pembangunan Kawasan Objek Wisata Bono) masih dihadapkan dengan beberapa rintangan dan hambatan, seperti masih rendahnya kualitas maupun kesadaran Sumber Daya Manusia terkait, untuk berubah ke arah yang lebih baik; masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pariwisata; konservasi alam yang berkelanjutan dan adanya regulasi dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, menurut penulis, seharusnya dalam mengimplementasikan peran dari bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan terhadap pengembangan pariwisata (Kawasan Objek Wisata Bono), selain dapat meningkatkan devisa bagi negara dan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Pelalawan, pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono diharuskan juga mampu meningkatkan kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk dapat menikmati manfaatnya, tentunya dengan tetap meneruskan dan meningkatkan pemberian dan pelaksanaan pelatihan-pelatihan tertentu untuk meningkatkan kualitas maupun kesadaran Sumber Daya Manusia terkait, baik itu masyarakat tempatan maupun pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di Kawasan Objek Wisata Bono.

SIMPULAN

Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Objek Wisata Bono telah diimplementasikan sedemikian rupa, namun belum terlaksana dengan optimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari terpenuhinya 4 indikator peran pemerintah yaitu peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator dalam upaya mengembangkan kepariwisataan (khususnya Kawasan Objek Wisata Bono). Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat teridentifikasi bahwa hanya indikator regulator saja yang sudah terpenuhi secara penuh. Sementara itu, untuk indikator dinamisator, telah diimplementasikan sedemikian rupa, namun tidak berjalan dengan efektif karena faktor kurangnya kualitas dan keinginan Sumber Daya Manusia terkait. Dan pemenuhan indikator katalisator, dibuktikan dengan adanya koordinasi dan partisipasi para pihak yang terlibat. Namun, indikator fasilitator, merupakan indikator yang dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat hambatan, seperti kurangnya sarana dan prasarana dan karena pelaksanaan peran oleh pihak bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan hanya dilakukan pada kondisi

tertentu (ketika gelombang Bono ada, yaitu sekitar bulan November dan Desember). Selain pada kondisi tersebut wilayah Kampung Bono dan Pantai Ogis kurang diperhatikan dan kurang dimanfaatkan serta dikelola dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tempatan maupun wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Kemudian, perlu diketahui bahwa hasil penelitian yang penulis peroleh dalam penelitian ini bukan memaparkan peranan Disparpora Kabupaten Pelalawan secara umum. Namun, hanya berfokus pada peran bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan saja.

REFERENSI

- Ananda, I., & Dirgahayu, T. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Desa Wisata di Indonesia: A Systematic Literature Review. *JATISI: Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 8(4).
- Aponno, C. (2020). Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 2(5).
- Asmara, C. J., & Muslim. (2015). Dualisme Administrasi Pemerintahan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus di Perbatasan Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu). *NAKHODA: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(23).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn.v14i1.6171>
- Bagaihing, M., Beno, J. B., Nugraha, Y. E., & Mantolas, C. M. (2023). Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Kuliner Lokal di Desa Tuamese Kabupaten Timor Tengah Utara. *TOURISM: Jurnal Travel, Hospitality, Culture, Destination and Mice*, 6(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32511/tourism.v6i2.1110>
- Chaerunnisa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(4).
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i4.28998>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th Edition). Sage Publications.
- Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Conference on Public Administration and Society*, 1(1).
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal I LA GALIGO: Public Administration Journal*, 3(1).
- Gianary, E. S., Kadarisman, A., & Soedewi, S. (2023). Perancangan Buku Ilustrasi Sebagai Media Untuk Memperkenalkan Batik Bono. *EProceedings of Art & Design*, 10(6).
- Hakim, I. N. (2018). "Pergeseran Budaya Siber & Visual di Sektor Pariwisata Indonesia": Respon Kementerian Pariwisata Menghadapi era Tourism 4.0 Melalui Peran Komunitas Milenial & Pengembangan Destinasi Digital. *Seminar Nasional Seni Dan Desain 2018*.
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/par.v3i2.1383>
- Kadarisman, A. (2021). Government Public Relations Dalam Pengembangan Pariwisata Masa Pandemi COVID-19 di Geopark Ciletuh. *PRofesi Humas*, 5(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/prh.v5i2.29800>
- Kartika, T. A., Achnes, S., & Sidiq, S. S. (2016). Atraksi Wisata Budaya dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Desa Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *JOM FISIP*, 3(2).
- Muharrman, R. (2013). *Kompetisi Bekudo Bono*. Antarafoto.Com.
<https://www.antarafoto.com/id/view/355851/kompetisi-bekudo-bono>
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Reference.
- Nalayani, N. N. A. H. (2016). Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Bali. *JUMPA: Jurnal Master Pariwisata*, 2(2).
- Nawang Sari, E. R., & Rahmatin, L. S. (2021). Opportunities and Challenges for Community-Based Tourism in Tamansari Village in The New Normal Era. *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 47(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v47i1.944>
- Nurjana, W., Amanati, R., & Faisal, G. (2017). Resor Pantai Ogis Muara Bono di Pelalawan Dengan Pendekatan Arsitektur Pesisir. *JOM FT*, 4(2).

- Paramita, I. B. G., & Putra, I. G. G. P. A. (2020). New Normal Bagi Pariwisata Bali di Masa Pandemi Covid 19. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya*, 5(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.25078/pba.v5i2.1723>
- Pradana, M. I. W., & Mahendra, G. K. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata di Objek Wisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 3(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i2.623>
- Qodriyatun, S. N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i2.1110>
- Rasyidah, R. (2019). Strategi Pariwisata 4.0: Peran Milenial dalam Nation Branding Wonderful Indonesia 2016-2019. *Global and Policy Journal of International Relations*, 7(2).
- Redaktur. (2022). 76 Tahun Indonesia Merdeka, Ya Beginilah Kondisi Jalan Lintas Bono (Pelalawan). *CMczone.Com*.
- Yani, A., Handayani, O. W. K., Rohidi, T. R., & Nasuka. (2021). *Potensi Pariwisata Olahraga Berselancar "Ombak Bono"* (I. B. Endrawan, Ed.). Ahlimedia Press.
- Yazid, T. P., Wirman, W., Yozani, R. E., Wahidar, T. I., Zurani, I., Angela, S., & Salsabila. (2022). Pelatihan Communication Skill Bagi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di Kabupaten Pelalawan. *Madaniya*, 3(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.53696/27214834.298>
- Yuliarti, R., & Saputra, D. (2015). Daya Tarik Gelombang Bono Sebagai Objek Wisata Unggulan di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Daya Saing*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35446/dayasaing.vii2.21>

Daftar Informan

- 1) Aswinda Hari Haharap, 48 Tahun, Kabid Pariwisata Disparpora, Disparpora Kabupaten Pelalawan (03 Oktober 2023).
- 2) Puji Triastuti, 41 Tahun, Staf Bagian Pariwisata Disparpora, Disparpora Kabupaten Pelalawan (06 Februari 2023).